



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIC INDONESIA**

**KEPUTUSAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIC INDONESIA**

NOMOR : 11 /DPR RI/III/2022-2023

TENTANG

**PROGRAM LEGISLASI NASIONAL
RANCANGAN UNDANG-UNDANG PRIORITAS TAHUN 2023**

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 dan Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 *juncto* Pasal 66 huruf a dan huruf b Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 *juncto* Pasal 40 ayat (7) Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pembentukan Undang-Undang, perlu menetapkan Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Prioritas Tahun 2023;
- b. bahwa Keputusan Rapat Kerja Badan Legislasi dengan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan Panitia Perancang Undang-Undang Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia pada tanggal 12 Desember 2022 telah menyepakati Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Prioritas Tahun 2023;
- c. bahwa penetapan Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Prioritas Tahun 2023 sebagaimana dimaksud dalam huruf c, ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6396);
3. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 667);
4. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pembentukan Undang-Undang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 668);

Memperhatikan : Keputusan Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia ke-13 tanggal 15 Desember 2022;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA TENTANG PROGRAM LEGISLASI NASIONAL RANCANGAN UNDANG-UNDANG PRIORITAS TAHUN 2023.**

PERTAMA : Menetapkan Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Prioritas Tahun 2023, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

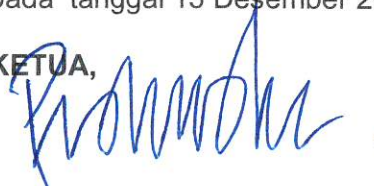
SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Pimpinan DPR RI;
2. Ketua DPD RI;
3. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI;
4. Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional RI;
5. Ketua Komisi I sampai dengan Komisi XI DPR RI;
6. Para Ketua Badan Alat Kelengkapan DPR RI;
7. Para Ketua Fraksi : FPDl Perjuangan, FPG, F-PGERINDRA, FNASDEM, FPKB, FDEMOKRAT, FPKS, FPAN, dan FPPP;

8. Sekretaris Jenderal DPR RI;
9. Para Deputi, Inspektur Utama, dan Kepala Badan Keahlian Sekretariat Jenderal DPR RI;
10. Para Kepala Biro/Pusat di Sekretariat Jenderal DPR RI.

Ditetapkan di Jakarta,
pada tanggal 15 Desember 2022

KETUA,



Dr. (H.C.) PUAN MAHARANI

LAMPIRAN

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIC INDONESIA

NOMOR : 11/DPR RI/II/2022-2023

TANGGAL : 15 Desember 2022

**DAFTAR PROGRAM LEGISLASI NASIONAL
RANCANGAN UNDANG-UNDANG PRIORITAS TAHUN 2023**

NO.	JUDUL RANCANGAN UNDANG-UNDANG	NA DAN RUU DISIAPKAN OLEH	KETERANGAN
1.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran.	DPR (KOMISI I)	<ul style="list-style-type: none"> • Proses penyusunan di Komisi I • Luncuran Prolegnas Prioritas 2022
2.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.	DPR (ANGGOTA)	<ul style="list-style-type: none"> • RUU sedang proses Pembicaraan Tk I di Komisi II • Luncuran Prolegnas Prioritas 2022
3.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana	DPR (KOMISI III)	Usulan baru Prolegnas Prioritas 2023
4.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya	DPR (KOMISI IV)	<ul style="list-style-type: none"> • Disetujui menjadi RUU Usul DPR pada Paripurna Tgl 7 Juli 2022 • Menunggu Surpres • Luncuran Prolegnas Prioritas 2022
5.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara.	DPR (KOMISI VI)	<ul style="list-style-type: none"> • RUU dalam tahap Harmonisasi di Badan Legislasi • Luncuran Prolegnas Prioritas 2022
6.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.	DPR (KOMISI VI)	Usulan baru Prolegnas Prioritas 2023

NO.	JUDUL RANCANGAN UNDANG-UNDANG	NA DAN RUU DISIAPKAN OLEH	KETERANGAN
7.	Rancangan Undang-Undang tentang Energi Baru dan Energi Terbarukan (dalam Prolegnas Tahun 2020-2024 tertulis Rancangan Undang-Undang tentang Energi Baru dan Terbarukan)	DPR (KOMISI VII)	<ul style="list-style-type: none"> • Disetujui menjadi RUU Usul DPR pada Paripurna Tgl 14 Juni 2022 • Menunggu Surpres • Luncuran Prolegnas Prioritas 2022
8.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah	DPR (KOMISI VIII)	Luncuran Prolegnas Prioritas 2022
9.	Rancangan Undang-Undang tentang Pengawasan Obat dan Makanan.	DPR (KOMISI IX)	<ul style="list-style-type: none"> • Proses penyusunan di Komisi IX • Luncuran Prolegnas Prioritas 2022
10.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan.	DPR (KOMISI X)	Luncuran Prolegnas Prioritas 2022
11.	Rancangan Undang-Undang tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (<i>omnibus law</i>) [dalam Prolegnas Tahun 2020-2024 tertulis Rancangan Undang-Undang tentang Reformasi Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (<i>omnibus law</i>)	DPR (KOMISI XI)	<ul style="list-style-type: none"> • Selesai harmonisasi di Badan Legislasi • Luncuran Prolegnas Prioritas 2022 <i>Omnibus Law</i>
12.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran	DPR (BADAN LEGISLASI)	<ul style="list-style-type: none"> • Disetujui menjadi RUU Usul DPR pada Paripurna Tgl 30 September 2021 • Pembicaraan Tk. I di Badan Legislasi • Luncuran Prolegnas Prioritas 2022

NO.	JUDUL RANCANGAN UNDANG-UNDANG	NA DAN RUU DISIAPKAN OLEH	KETERANGAN
13.	Rancangan Undang-Undang tentang Larangan Minuman Beralkohol	DPR (BADAN LEGISLASI)	<ul style="list-style-type: none"> • Proses penyusunan di Badan Legislasi • Luncuran Prolegnas Prioritas 2022
14.	Rancangan Undang-Undang tentang Bahan Kimia	DPR (BADAN LEGISLASI)	<ul style="list-style-type: none"> • Proses penyusunan di Badan Legislasi • Luncuran Prolegnas Prioritas 2022
15.	Rancangan Undang-Undang tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga	DPR (BADAN LEGISLASI)	<ul style="list-style-type: none"> • Menunggu Paripurna Persetujuan Menjadi RUU Usul DPR • Luncuran Prolegnas Prioritas 2022
16.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD.	DPR (BADAN LEGISLASI)	Usulan baru Prolegnas Prioritas 2023
17.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik.	DPR (BADAN LEGISLASI)	Usulan baru Prolegnas Prioritas 2023
18.	Rancangan Undang-Undang tentang Kesehatan (<i>Omnibus Law</i>) Dalam Prolegnas Perubahan Ketiga Tahun 2020-2024 tertulis Rancangan Undang-Undang tentang Sistem Kesehatan Nasional)	DPR (BADAN LEGISLASI)	Usulan baru Prolegnas Prioritas 2023 <i>Omnibus Law</i>
19.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia	DPR (BADAN LEGISLASI)	Luncuran Prolegnas Prioritas 2022
20.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial.	DPR (BADAN LEGISLASI)	Usulan baru Prolegnas Prioritas 2023

NO.	JUDUL RANCANGAN UNDANG-UNDANG	NA DAN RUU DISIAPKAN OLEH	KETERANGAN
21.	Rancangan Undang-Undang tentang Kefarmasian	DPR (BADAN LEGISLASI)	Luncuran Prolegnas Prioritas 2022
22.	Rancangan Undang-Undang tentang Masyarakat Hukum Adat.	DPR (ANGGOTA)	<ul style="list-style-type: none"> • Menunggu Paripurna Persetujuan Menjadi RUU Usul DPR • Luncuran Prolegnas Prioritas 2022
23.	Rancangan Undang-Undang tentang Perlindungan Tokoh Agama dan Simbol Agama.	DPR (ANGGOTA)	Luncuran Prolegnas Prioritas 2022
24.	Rancangan Undang-Undang tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak.	DPR (ANGGOTA)	<ul style="list-style-type: none"> • Disetujui menjadi RUU Usul DPR pada Paripurna Tgl 30 Juni 2022
25.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.	DPR (ANGGOTA)	Diusulkan masuk dalam Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2023
26.	Rancangan Undang-Undang tentang Hukum Acara Perdata.	PEMERINTAH	<ul style="list-style-type: none"> • RUU sedang proses Pembicaraan Tk I di Komisi III • Luncuran Prolegnas Prioritas 2022
27.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.	PEMERINTAH	<ul style="list-style-type: none"> • RUU sedang proses Pembicaraan Tk I di Komisi III • Luncuran Prolegnas Prioritas 2022
28.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1973 tentang Landas Kontinen Indonesia.	PEMERINTAH	<ul style="list-style-type: none"> • RUU sedang proses Pembicaraan Tk. I di Pansus • Luncuran Prolegnas Prioritas 2022
29.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.	PEMERINTAH	<ul style="list-style-type: none"> • SurPres sudah disampaikan ke DPR • Luncuran Prolegnas Prioritas 2022

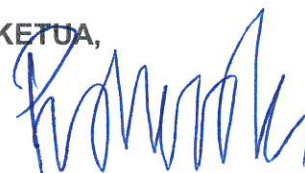
NO.	JUDUL RANCANGAN UNDANG-UNDANG	NA DAN RUU DISIAPKAN OLEH	KETERANGAN
30.	Rancangan Undang-Undang tentang Desain Industri.	PEMERINTAH	<ul style="list-style-type: none"> • Dalam proses permohonan SurPres • Luncuran Prolegnas Prioritas 2022
31.	Rancangan Undang-Undang tentang Wabah.	PEMERINTAH	<ul style="list-style-type: none"> • Dalam proses Permohonan SurPres • Luncuran Prolegnas Prioritas 2022
32.	Rancangan Undang-Undang tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila.	PEMERINTAH	<ul style="list-style-type: none"> • SurPres sudah diterima DPR • Proses Pendalaman di internal Pemerintah • Luncuran Prolegnas Prioritas 2022
33.	Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana.	PEMERINTAH	Luncuran Prolegnas Prioritas 2022
34.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten.	PEMERINTAH	Usulan baru Prolegnas Prioritas 2023
35.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara	PEMERINTAH	Usulan baru Prolegnas Prioritas 2023
36.	Rancangan Undang-Undang tentang Pengadaan Barang dan Jasa Publik	PEMERINTAH	Usulan baru Prolegnas Prioritas 2023
37.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan.	DPD	Luncuran Prolegnas Prioritas 2022
38.	Rancangan Undang-Undang tentang Daerah Kepulauan	DPD	<ul style="list-style-type: none"> • RUU sedang proses Pembicaraan Tk I di Pansus • Luncuran Prolegnas Prioritas 2022

NO.	JUDUL RANCANGAN UNDANG-UNDANG	NA DAN RUU DISIAPKAN OLEH	KETERANGAN
39.	Rancangan Undang-Undang tentang Bahasa Daerah.	DPD	Usulan baru Prolegnas Prioritas 2023

DAFTAR RUU KUMULATIF TERBUKA

1.	Daftar Rancangan Undang-Undang Kumulatif Terbuka tentang Pengesahan Perjanjian Internasional
2.	Daftar Rancangan Undang-Undang Kumulatif Terbuka akibat Putusan Mahkamah Konstitusi
3.	Daftar Rancangan Undang-Undang Kumulatif Terbuka Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
4.	Daftar Rancangan Undang-Undang Kumulatif Terbuka tentang Pembentukan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota
5.	Daftar Rancangan Undang-Undang Kumulatif Terbuka tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang menjadi Undang-Undang

KETUA,



Dr. (H.C.) PUAN MAHARANI